



fiskal

waspada antisipatif responsif



Menuju Konsolidasi Fiskal 2023

Reformasi Perpajakan Menuju Konsolidasi Fiskal yang Berkualitas

Innovative Financing sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Ekonomi Inklusif: Paradigma Pembangunan Ekonomi yang Lebih Holistik





Warta Fiskal dapat diunduh melalui website fiskal.kemenkeu.go.id

atau silahkan pindai QRcode dibawah ini:



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:

Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty, Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan, Adelia Surya Pratiwi

Tim Redaksi:

Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini, Praptono Djunedji, Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary, Chintya Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto, Patria Yoga Asmara, Mohamad Nasir, Angga Eko Prasetyo Wirastomo, Anggi Pratiwi

Desain Grafis:

Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:

Lutfi Nursela Feninsa

Konsolidasi Fiskal

Syahrir Ika¹



Proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi sedang berlangsung. Harapannya, Indonesia segera keluar dari kontraksi ekonomi dan pulih secara bertahap. Masa pandemi adalah masa ekonomi mengalami *shock*, baik dari sisi *supply* maupun dari sisi *demand*. Produksi barang dan jasa mengalami gangguan berat, pada saat yang sama perbankan juga tidak bisa menjalankan perannya secara efektif karena lemahnya permintaan dana dari masyarakat dan dunia. Pasokan dana perbankan cukup, akan tetapi permintaan lemah.

Namun, kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan untuk memulihkan ekonomi nasional cukup efektif dalam menyelamatkan kesehatan masyarakat dan ekonomi Indonesia. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mendorong pemulihan ekonomi nasional lebih cepat lagi agar dunia usaha bisa segera bangkit, perbankan bisa mengalirkan dananya untuk mengisi kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha, baik industri maupun UMKM.

Namun, kondisi ekonomi global masih kurang bersahabat. Muncul lagi

tantangan baru yang bisa menahan semua upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional. Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan telah membuat terjadinya gangguan *global supply chain*, terutama pangan dan energi. Negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat paling awal terkena dampak, selanjutnya China dan kemudian implikasinya ke banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, yang memiliki hubungan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dengan China. Sebagai bangsa yang besar dan memiliki pengalaman

¹Ketua Dewan Redaksi Warta Fiskal

dalam mengantisipasi berbagai krisis ekonomi global, pemerintah harus memiliki keyakinan mampu mengatasi tantangan-tantangan krisis ekonomi global yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2023 dan 2024. Banyak lembaga keuangan internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat sehingga ekonomi Indonesia juga diperkirakan ikut melambat. Dan, ini tentu akan mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

Apa yang perlu dilakukan Indonesia? Pemerintah harus memastikan bahwa pengaruh pelambatan ekonomi dunia ke Indonesia harus sekecil mungkin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 harus diupayakan berada di level sekitar 5 persen atau lebih. Namun, pemerintah harus mempunyai strategi atau kiat-kiat yang jitu. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro 2022, pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program *pro-poor* dan *pro-job* untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah akan melakukan penyempurnaan program-

program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Pilihan Kebijakan Konsolidasi fiskal

APBN tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi, meneruskan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Konsolidasi fiskal akan terus dilanjutkan di tahun 2023 untuk memuluskan normalisasi defisit APBN untuk kembali di bawah 3 persen PDB sesuai amanat UU 2/2020 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Belanja negara diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan *spending better*, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Sementara, kebijakan pembiayaan anggaran disusun dalam kerangka konsolidasi fiskal dan *refocusing* anggaran sehingga target pembiayaan utang terus terkendali dan menurun. Pemerintah bertekad pada 2023 defisit APBN harus kembali paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB sesuai amanat Undang-Undang.

Dalam berbagai kesempatan, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa ada saat ekonomi nasional semakin menguat dan pulih dari krisis akibat pandemi, pilihan kebijakan konsolidasi fiskal tetap harus dilakukan. Di satu sisi, kebijakan tersebut untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi sektor swasta

untuk semakin pulih.

Kebijakan konsolidasi fiskal juga akan memastikan kesehatan dan sustainabilitas APBN untuk dapat kembali menyerap tekanan jika terjadi guncangan kembali di kemudian hari (mediakeuangan.kemenkeu.go.id).

Untuk kembali ke level defisit 3 persen, pemerintah akan fokus memperhatikan alokasi-alokasi belanja dan mengoptimalkan penerimaan serta menjaga agar pemulihan ekonomi tidak melambat. Sementara dari sisi moneter, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi untuk meng-*handle* tekanan inflasi saat ini agar tidak mendisrupsi pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dan tidak menggerus daya beli masyarakat yang sedang dalam proses pemulihan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah menegaskan bahwa konsolidasi fiskal harus dilakukan pada tahun 2023 (news.ddtc.co.id). Secara makrofiskal, konsolidasi fiskal merupakan momentum meningkatkan penerimaan pajak dan belanja yang lebih baik. Bila tidak ada reformasi, defisit akan melebar dan berdampak pada risiko utang. Karena itu, konsolidasi fiskal merupakan kiat penting untuk membentengi ekonomi Indonesia dari dampak krisis ekonomi global dan menjamin keberlangsungan fiskal. Demikian editorial, selamat membaca.

DAFTAR ISI

6

WAWANCARA

Wahyu Utomo: Strategi Konsolidasi Fiskal di Tengah Pemulihan dan Peningkatan Risiko Global

10

FOKUS

10

Reformasi Perpajakan Menuju Konsolidasi Fiskal yang Berkualitas

14

Innovative Financing sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

18

Ekonomi Inklusif: Paradigma Pembangunan Ekonomi yang Lebih Holistik

23

INSPIRASI

MUDA BICARA

RENUNGAN

SERBA-SERBI

30

FISKALISTA

RESENSI

GLOSARIUM



Wahyu Utomo:

Strategi Konsolidasi Fiskal di Tengah Pemulihan dan Peningkatan Risiko Global

Indha Sendary²

Hampir tiga tahun dunia termasuk Indonesia berada di tengah pandemi. Masih teringat di ingatan masa awal pandemi yang menuntut seluruh negara kebijakan luar biasa dalam menghadapi virus yang pertama kali di temukan di Tiongkok tersebut. Indonesia sendiri mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani kasus yang bermula hanya berdampak ke kesehatan namun merambat ke berbagai aspek lain. Salah satu kebijakan Indonesia ialah dengan pelebaran defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun melalui

Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020. Dampak dari kebijakan tersebut pun telah dirasakan manfaatnya. Pandemi di Indonesia terkendali dengan baik. Indonesia pun menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat pulih lebih cepat dibandingkan dengan negara G20 atau ASEAN lainnya.

Sembari terus menjaga momentum pemulihan ekonomi, Pemerintah Indonesia juga terus melakukan konsolidasi fiskal secara terukur untuk mencapai defisit fiskal kembali ke level maksimal

3% di tahun 2023. Dalam menjaga keduanya tetap selaras, Pemerintah Indonesia berupaya mengeluarkan strategi agar konsolidasi berjalan lancar tanpa mengganggu proses pemulihan yang masih berlanjut.

Kali ini, tim redaksi Warta Fiskal mewawancarai Wahyu Utomo selaku Plt. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), Badan Kebijakan Fiskal yang menjadi salah satu aktor penting dalam penyusunan kebijakan APBN.

²Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Ketika ditanya bagaimana Indonesia mampu untuk menghadapi tantangan saat ini, termasuk pandemi yang telah bersama kita selama tiga tahun, Wahyu mengungkapkan pentingnya memahami fungsi APBN. APBN berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Dengan berlandaskan dari tiga fungsi dasar tersebut, maka pemerintah dapat mengoptimalkan APBN sebagai salah satu pendorong ekonomi di tengah risiko yang tinggi. "Harus di mulai dengan menjaga fungsi APBN sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi tetap berjalan optimal walaupun perekonomian global dan domestik itu bergerak sangat dinamis", ucap pria kelahiran Yogyakarta tersebut.

Seperti diketahui, saat ini kondisi dunia masih diliputi ketidakpastian yang sangat tinggi. Untuk itu, APBN berperan sebagai penyerap tekanan (*shock absorber*) yang berasal dari luar. "Jika diterjemahkan dalam fungsi APBN, *shock absorber* berarti mampu menjaga stabilitas ekonomi. APBN digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, APBN juga harus dapat menjaga tren pemulihan tetap berlanjut dan semakin menguat, karena jika pemulihan yang berlangsung saat ini terhambat, maka biayanya (*cost*) akan mahal" lanjut Wahyu. Di samping menjalankan perannya sebagai *shock absorber*,

pemerintah melalui APBN harus mampu menjaga program-program prioritas pembangunan atau Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan.

Untuk menjalankan berbagai upaya tersebut di tengah kondisi ketidakpastian saat ini, pemerintah perlu menyusun strategi yang lebih solid, salah satunya dengan konsolidasi. "Kalau kita mau memfungsikan APBN sebagai *shock absorber*, APBN-nya harus sehat. Makanya, kendalikan risiko dengan lebih solid, salah satunya melalui konsolidasi", ungkap pria dua tersebut melanjutkan. Caranya, melakukan konsolidasi di tahun 2023 dengan menurunkan kembali defisit APBN di bawah 3%. Wahyu menambahkan, selain itu, pemanfaatan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mengurangi kebutuhan anggaran pembiayaan juga perlu dioptimalisasi. Jika risiko dan pembiayaan dapat dikendalikan, maka menurutnya kondisi fiskal akan menjadi lebih sehat.

Dari sisi belanja, upaya yang dapat ditempuh dengan memperkuat belanja yang berkualitas (*spending better*). Caranya dengan menata dan merekonstruksi belanja agar tidak hanya lebih efisien tetapi juga tetap produktif. Ia mencontohkan beberapa belanja yang bukan prioritas seperti belanja operasional dan birokrasi dapat dibuat lebih efisien. "Efisien di sini artinya bukan mengurangi, tetapi sesuai kebutuhan.

Bila telah sesuai dengan kebutuhan, harusnya lebih hemat" tambah Wahyu. Prinsipnya yaitu *cost effectiveness*, di mana untuk mencapai tujuan tertentu dilakukan dengan belanja paling efisien.

Strategi lain untuk penguatan *spending better* dengan fokus adalah pada belanja prioritas. Belanja prioritas ini ialah belanja yang sesuai dengan arah kebijakan fiskal. "Di tahun 2023, fokus untuk kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi. Jadi, belanjanya yang mengarah ke sana", ungkapnya lagi. Untuk melakukan transformasi ekonomi, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, belanja diarahkan untuk peningkatan modal SDM (*human capital*) Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain. Modal manusia ini diperkuat melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (*perlinsos*). Dengan demikian, diharapkan SDM Indonesia menjadi SDM yang unggul, yaitu SDM yang produktif, inovatif, terampil, tetapi sejahtera.

Hal lain yang menjadi prioritas ialah modal fisik (*physical capital*) atau infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini juga harus yang mendukung transformasi ekonomi, salah satunya infrastruktur teknologi berbasis informasi dan komunikasi (*Information Communication Technology/ICT*). "Sekarang kan aktivitas ekonomi sudah

“Transformasi ekonomi itu birokrasinya harus efisien tapi *supportive*. Prinsipnya *to serve, to help, to support*.”

bergeser. Kita sudah tidak mengandalkan ekonomi berbasis konvensional dan beralih ke aktivitas ekonomi berbasis ICT. Jadi struktur ekonomi ke arah sana, infrastrukturnya *support* ke arah sana” jelas pria kelahiran Februari 1970 ini. Di samping itu, infrastruktur untuk konektivitas untuk memperlancar distribusi dan mobilisasi, seperti bandara dan pelabuhan.

Selanjutnya, untuk mendukung aktivitas ekonomi yang banyak ditopang oleh energi, dibutuhkan pembangunan infrastruktur energi. Ada pun infrastruktur energi ini berupa kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT). Tidak hanya aktivitas ekonomi, pemerintah perlu memastikan ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, infrastruktur untuk mendorong ketahanan pangan seperti irigasi dan bendungan juga perlu dilanjutkan.

Selain kedua modal tersebut, pemerintah juga perlu melakukan reformasi birokrasi untuk mendorong transformasi ekonomi. “Transformasi ekonomi itu birokrasinya harus efisien tapi *supportive*. Prinsipnya

to serve, to help, to support”, terang Wahyu. Ia menekankan bahwa birokrasi harus berkualitas tetapi efisien sehingga memiliki daya saing. “Kalau birokrasi tidak efisien dan berdaya saing, maka investasi tidak akan masuk”, tambahnya.

Hal penting lain dalam mendukung transformasi ekonomi ialah dengan revitalisasi industri. “Kita punya industri, tapi maunya ke depan kita harusnya mengolah yang bisa menciptakan nilai tambah. Jadi kita jangan lagi mengekspor barang – barang mentah,” ungkap Wahyu. Menurutnya jika barang – barang yang diekspor merupakan barang – barang bernilai tambah atau barang jadi, maka efek penggandanya (*multiplier effect*) lebih besar. Dengan mendorong industri bernilai tambah melalui revitalisasi industri, maka penyerapan tenaga kerja dapat meningkat dan penerimaan negara juga dapat bertambah.

Upaya yang tidak kalah penting untuk mencapai transformasi ekonomi lainnya menurut Wahyu adalah mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan dengan mengarahkan pertumbuhan yang lebih hijau. Artinya, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi, namun dengan emisi yang rendah. “Biasanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi menimbulkan emisi yang tinggi. Kalau emisinya

banyak, maka pertumbuhan tidak akan *sustain* karena mengganggu keberlanjutan kehidupan”, jelas pria lulusan Universitas Gajah Mada tersebut. Oleh karena itu, diperlukan energi yang lebih ramah lingkungan untuk mendorong aktivitas ekonomi. “Saat ini energi kita masih fosil batubara dan suatu saat akan habis. Kita harus mulai mencari sumber – sumber energi baru terbarukan”, ujar Wahyu. Beberapa energi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan di Indonesia antara lain energi berbasis air (*hydro*), angin, dan tenaga surya. Untuk mencapai bauran energi yang lebih hijau tersebut, dibutuhkan transisi energi yang *smooth* dan tidak berdampak negatif terhadap ekonomi, sosial, fiskal, dan layanan publik.

Lebih lanjut Wahyu menekankan, agar tujuan konsolidasi tetap *smooth*, kolaborasi menjadi bagian yang penting. “Dalam kondisi seperti ini, kita harus kolaborasi. Kita tidak bisa menghadapi hal ini dengan kebijakan fiskal sendirian. Bauran kebijakan dengan moneter dan sektor keuangan serta Pemda perlu dilakukan bersama – sama untuk merespons ketidakpastian”, terang Wahyu.

Selain itu, untuk mencapai konsolidasi yang *smooth* dan berkualitas, upaya lain yang harus dilakukan yaitu dengan reformasi fiskal. “Pengendalian risiko untuk konsolidasi, harus disertai dengan reformasi fiskal.

Dengan itu, maka kita bisa menjaga keseimbangan kemampuan mengendalikan risiko yang tetap disertai dengan kemampuan untuk menghindari *opportunity loss* yaitu menjaga pemulihan ekonomi tetap berlanjut”, ujar Wahyu.

Ke depan, Wahyu mengungkapkan optimisme penerapan konsolidasi akan berjalan sesuai dengan jalur yang direncanakan sembari mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup menguat saat ini. “Selain tetap sebagai *shock absorber*, APBN untuk mendorong pertumbuhan dilakukan dengan *spending better*. Cara yang kedua dengan *creative financing*”, terang Wahyu ketika ditanya upaya pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan di tengah upaya stabilisasi dan konsolidasi.

Selain memanfaatkan APBN, sumber pembiayaan juga dapat diperoleh dengan pemberdayaan dari sektor swasta, salah satunya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dapat digunakan jika terdapat proyek yang layak (*feasible*) secara ekonomi tetapi memiliki keterbatasan secara finansial.

Upaya lain yang dapat ditempuh yaitu pemanfaatan *sovereign wealth fund* (dana abadi) yang dikelola oleh Indonesia National Authority (INA). “Uang jangan hanya disimpan, tetapi dikelola. Misalnya untuk alat stabilisasi, menarik

investasi, dan mengakselerasi program yang menjadi target pembangunan”, tambah Wahyu. Terakhir, pemerintah dapat menggunakan quasi fiskal dengan memberdayakan *special mission vehicle* (SMV) baik dari BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU).

Sementara dari sisi perpajakan, menurut Wahyu, pemerintah harus mampu menciptakan sistem perpajakan sesuai dengan kapasitas ekonomi. “Harusnya pajak dihasilkan dari aktivitas ekonomi, bukan dari sumber daya alam yang akan habis. Caranya dengan membuat sistem perpajakan yang lebih *compatible* dengan struktur ekonomi”, ungkap Wahyu. Saat ini, semakin banyak aktivitas ekonomi berbasis digital di Indonesia. Oleh karena itu, sistem perpajakan pun harus disesuaikan untuk dapat menangkap aktivitas ekonomi tersebut.

Selain itu, penerapan perpajakan harus berlandaskan prinsip keadilan. Pengenaan pajak dilakukan dengan progresif, di mana orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi perlu membayar pajak yang lebih tinggi pula. Terakhir, pemerintah harus mampu membuat wajib pajak untuk masuk dalam sistem dengan memfomalisasi sektor informal. Dengan kombinasi upaya – upaya tersebut, diharapkan perpajakan dapat tumbuh optimal sesuai kapasitas ekonomi tanpa mengganggu iklim investasi.

Menutup perbincangan,

“Dengan dipahami, kita paham strategi risiko. Kita juga jadi tetap waspada tapi tidak takut. Sehingga di tengah ketidakpastian, kita bisa bertahan bahkan bangkit dan memperkuat fondasi untuk Indonesia maju. Kita harus terus waspada tapi tetap optimis”

Wahyu menyampaikan bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang masih eskalatif penting untuk memahami titik *vulnerable* agar kita mampu memitigasi risiko yang lebih sulit. “Dengan dipahami, kita paham strategi risiko. Kita juga jadi tetap waspada tapi tidak takut. Sehingga di tengah ketidakpastian, kita bisa bertahan bahkan bangkit dan memperkuat fondasi untuk Indonesia maju. Kita harus terus waspada tapi tetap optimis” tutup Wahyu.



TAX REFORM

Reformasi Perpajakan Menuju Konsolidasi Fiskal yang Berkualitas

Sidiq Suryo Nugroho³

RAPBN 2023 dan Tantangannya

RAPBN 2023 disusun di tengah ketidakpastian dan peningkatan risiko perekonomian global, membuat APBN akan menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang harus mampu untuk dimitigasi dengan baik di tahun depan.

Di dalam dokumen Nota Keuangan tahun anggaran 2023 disebutkan RAPBN 2023 mengusung tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Hal ini menunjukkan upaya dan niat teguh Pemerintah dalam menyusun kebijakan bagi

pembangunan nasional. Tema tersebut akan diwujudkan melalui upaya peningkatan produktivitas nasional yang merupakan kunci penguatan kinerja ekonomi untuk jangka menengah-panjang. Sementara dalam jangka pendeknya penguatan dan penyehatan APBN menjadi hal yang penting untuk dilakukan

³Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

agar APBN dapat menjalankan peran sesuai fungsinya, serta menuju konsolidasi fiskal yang berkualitas.

Tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan APBN yang kuat dan sehat tidaklah mudah, diperlukan berbagai strategi untuk dapat melewatinya. Berbagai tantangan yang muncul sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih tersisa, di antaranya terkait penundaan beberapa investasi, adanya pengangguran, terganggunya rantai pasokan, dan dari sisi SDM adanya keterlambatan proses pembelajaran bagi sebagian siswa sekolah, merupakan hal yang harus segera diatasi dan perlu penanganan yang tepat.

Selain tantangan tersebut, terdapat juga risiko global yang mulai bergeser isunya dari pemasalahan dampak pandemi kepada gejolak ekonomi global. Risiko yang juga merupakan tantangan dari gejolak perekonomian global akan berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian domestik Indonesia. Hal itu diantaranya masih terjadinya perlambatan ekonomi dunia dan pelemahan perdagangan global yang dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor nasional. Lebih lanjut, dampak tensi geopolitik yang meningkat akhir-akhir ini membuat potensi terjadinya *stagflasi* akibat lonjakan inflasi global yang diperkirakan akan menyebabkan moderasi pada

harga komoditas, termasuk komoditas andalan Indonesia yaitu CPO dan minerba. Oleh karena itu, pada tahun 2023 nanti dibutuhkan kinerja ekonomi yang kuat dan cepat untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus sebagai upaya akselerasi transformasi ekonomi.

Berbagai Peranan APBN di 2023

Di tengah berbagai tantangan menuju tahun 2023, perekonomian Indonesia terpantau masih cukup kuat pertumbuhannya hingga akhir Juli 2022, sementara inflasi meningkat namun tetap terkendali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat menguat secara signifikan pada triwulan II 2022, dimana mampu tumbuh mencapai 5,44% yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga serta kinerja dari ekspor Indonesia yang tinggi. Faktor lain yang mendukung optimisme kinerja ekonomi domestik adalah inflasi di Indonesia yang dalam tren meningkat seiring dengan tekanan inflasi global namun masih dalam kendali. Sehingga jika dibandingkan dengan inflasi di negara lain, inflasi di Indonesia 4,9% (yoy) di bulan Juli 2022 masih lebih moderat dibandingkan inflasi yang terjadi di Philipina (6,4%), India (6,7%), dan Singapura (6,7%).

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022 yang masih kuat tersebut

menjadi modal positif bagi penyusunan RAPBN 2023. Optimis namun tetap waspada menjadi kata kunci bagi Pemerintah dalam membangun arsitektur RAPBN 2023. Berdasarkan kinerja positif perekonomian maka Pemerintah optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat terus menguat di tahun depan. Hal itu didukung dengan penguatan konsumsi dalam negeri, kinerja ekspor yang masih solid, serta laju inflasi yang terkendali. Di sisi yang lain, Pemerintah juga berwaspada di tahun depan terhadap risiko ketidakpastian yang tinggi akibat adanya *scarring effect* inflasi yang tinggi. Tensi geopolitik global dan pengetatan kebijakan moneter negara maju secara agresif juga mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan akan adanya gejolak pada perekonomian di tahun depan.

Dalam memitigasi hal tersebut Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN di tahun 2023 pada tiga fungsi besarnya melalui berbagai kebijakan fiskal. *Pertama*, APBN di 2023 akan berperan sebagai *shock absorber* saat terjadi gejolak pada perekonomian antara lain melalui kebijakan pemberian subsidi, kompensasi, maupun bantuan sosial. *Kedua*, APBN berperan sebagai *tools* untuk memitigasi berbagai risiko fiskal yang berdampak pada perekonomian. Salah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko adalah melalui

pengendalian atas defisit anggaran dan utang dalam APBN sehingga konsolidasi fiskal dapat tetap dijalankan di tahun 2023. *Ketiga*, peran APBN adalah menjaga momentum transformasi ekonomi yang tengah terjadi. Kebijakan untuk mendukung hal itu diantaranya dengan memastikan efektivitas reformasi fiskal yang tengah dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dan komitmen *spending better* pada sisi belanja negara.

Berbagai peran dan fungsi APBN sebagai instrumen dalam pembangunan yang dituangkan melalui berbagai kebijakan fiskal tersebut akan digunakan untuk merespons berbagai dinamika yang berpengaruh bagi perekonomian nasional. Konsolidasi fiskal yang berkualitas diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun 2023 sebagaimana amanat dalam UU Nomor 2 tahun 2020, sehingga defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB di dalam APBN dapat diwujudkan.

Reformasi dan Kebijakan Perpajakan Mendukung Konsolidasi Fiskal

Dalam mendukung fungsi dan peran APBN bagi perekonomian dan pembangunan maka

diperlukan dukungan yang solid dari sisi pendapatan negara sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN. Berdasarkan Nota Keuangan 2023 yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, disebutkan bahwa pada RAPBN tahun anggaran 2023 target Pendapatan Negara dan Hibah diproyeksikan sebesar Rp2.443,6 triliun, sedangkan kebutuhan Belanja Negara diperkirakan mencapai Rp3.041,7 triliun, sehingga defisit anggaran di tahun 2023 diperkirakan Rp598,2 triliun atau 2,85% terhadap PDB. Secara lebih rinci, Pendapatan Negara dalam RAPBN 2023 terdiri dari penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun, PNPB sebesar Rp426,3 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Kinerja penerimaan perpajakan yang berkontribusi 82,5% terhadap Pendapatan Negara harus dipastikan kinerjanya optimal di tahun 2023. Optimisme kinerja penerimaan perpajakan tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya perkembangan sektor usaha jasa yang semakin mendominasi kontribusinya terhadap nilai tambah (PDB) sektoral Indonesia. Pada tahun 2020 kontribusi sektor jasa tercatat sebesar 42,9% terhadap PDB, disusul sektor Manufaktur yang berkontribusi sebesar 19,3%, dan sektor Pertanian berkontribusi 13,9% terhadap PDB. Selain itu, perkembangan jumlah penduduk kelas menengah di

Indonesia semakin meningkat dan tingkat konsumsinya yang juga tumbuh tinggi. Hal ini dapat menjadi pendorong penerimaan perpajakan di masa depan jika digali potensinya dengan benar.

Target Pendapatan Negara pada APBN 2023 diharapkan dapat tercapai melalui upaya optimalisasi penerimaan dengan tetap memperhatikan risiko moderasi harga komoditas yang kemungkinan terjadi. Optimalisasi penerimaan perpajakan harus diupayakan seiring dengan pemulihan ekonomi dan didukung oleh efektivitas reformasi perpajakan. Keberlanjutan reformasi perpajakan dipastikan melalui implementasi UU HPP yang berjalan dengan efektif, penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, serta reformasi administrasi perpajakan juga dilakukan secara berkesinambungan.

Lebih lanjut, upaya untuk melanjutkan reformasi Perpajakan sebagai bagian dari reformasi fiskal akan terus dijalankan oleh Pemerintah. Pada tahun 2023 penerimaan perpajakan utamanya akan didukung oleh peningkatan kontribusi PPN sejalan dengan implementasi kebijakan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Hal ini merupakan amanat UU HPP sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Selain itu, kinerja PPN juga didukung oleh permintaan atas konsumsi di dalam negeri yang diperkirakan akan tetap tinggi. Dukungan

kebijakan perpajakan sebagai implementasi aturan turunan UU HPP antara lain berupa integrasi data perpajakan, NIK sebagai NPWP, dan penerapan pajak karbon menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi perpajakan. Kebijakan pajak yang lainnya juga diarahkan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, diantaranya penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan, penguatan reformasi bidang SDM dan organisasi, perbaikan proses bisnis menuju *coretax*, pengawasan, dan penegakan hukum. Tak lupa insentif pajak yang terarah dan terukur akan tetap diberikan untuk mendukung iklim investasi dan daya saing nasional.

Di sisi penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dukungan optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh melalui kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai baru. Cukai baru pada produk plastik dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diharapkan dapat mulai diterapkan pada tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE) terus dilakukan untuk mendorong daya saing, efisiensi waktu dan biaya logistik di dalam negeri.

Berbagai upaya reformasi dan kebijakan perpajakan

tersebut dimaksudkan sebagai upaya menciptakan APBN yang kuat dan sehat serta berkesinambungan sehingga target pembangunan nasional dapat terwujud. Dalam jangka pendeknya optimalisasi penerimaan negara diusahakan untuk dapat mewujudkan konsolidasi fiskal 2023 yang berkualitas. Semoga usaha bersama dan gotong royong seluruh komponen bangsa dalam mendukung konsolidasi fiskal dapat mewujudkan cita-cita nasional yaitu kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.





Innovative Financing sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Immanuel Bekti Hartanto⁴

Menuju Konsolidasi Fiskal, begitulah arah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2023. Konsolidasi fiskal mengandung makna bahwa Pemerintah melakukan upaya untuk pendisiplinan fiskal dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal. Konsolidasi fiskal yang dilakukan pun harus yang berkualitas sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga kondisi fiskal tetap sehat dan mampu memelihara momentum pemulihan terus menguat. Untuk itu R-APBN Tahun 2023 dirancang untuk membangkitkan optimisme,

dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun dengan kewaspadaan yang tetap tinggi. Sehingga RAPBN 2023 di desain untuk dapat meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Untuk itu pendapatan dan belanja serta pembiayaan harus fleksibel menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Dalam kaitannya dengan Pembiayaan yang didesain harus fleksibel dalam menyediakan ruang fiskal, maka pembiayaan APBN 2023 didesain untuk dapat mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur yaitu melalui pembiayaan yang *prudent*, kreatif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk itu pembiayaan direncanakan dipenuhi melalui Utang dan Non Utang. Pembiayaan utang sebagai instrumen *countercyclical* harus dikelola secara *prudent* dan *sustainable*, serta rasio utang terkendali dan menurun dalam jangka menengah.

⁴Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

Sementara itu pembiayaan non utang akan diarahkan untuk pemanfaatan SAL, peningkatan manajemen kas, mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi, serta *innovative financing* yang akan sangat berperan dalam mengakselerasi pembangunan khususnya infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendukung serta mendorong kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan infrastruktur yang baik maka arus lalu lintas orang maupun distribusi barang akan berjalan dengan lancar sehingga akan sangat mendukung kegiatan ekonomi. Namun demikian untuk menyediakan infrastruktur dibutuhkan dana yang cukup besar. Pemerintah telah mengalokasikan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur, namun demikian karena kondisi geografis Indonesia yang cukup luas, jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN, maka akan memakan waktu yang cukup lama.

Selain APBN masih terdapat beberapa alternatif skema pembiayaan kreatif infrastruktur, diantaranya melalui penugasan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), SWF (*Sovereign Wealth Funds*), SMV (*Special Mission Vehicles*), skema KPBU (Kerja

sama Pemerintah dan Badan Usaha), dan skema *Blended Financing*.

Penugasan BUMN

pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelimpahan wewenang pemerintah kepada instansi lain untuk menyelenggarakan suatu kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 66 yang berbunyi "Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN".

SWF

merupakan kendaraan finansial yang dimiliki oleh Negara. Yang dapat mengelola dana publik (dana investasi milik pemerintah) dan menginvestasikan untuk berbagai tujuan ekonomi makro. Secara sederhana, SWF adalah tabungan negara, kelebihan dana yang dimiliki oleh negara yang diinvestasikan dengan tujuan untuk *return* yang lebih besar lagi.

Indonesia telah resmi memiliki *Sovereign Wealth Fund* (SWF) sejak pertengahan Desember 2020 sejak didirikannya Indonesia *Investment Authority* (INA). INA telah mendapatkan modal dari Pemerintah sebesar Rp75 triliun. Modal berupa dana tunai yang disetorkan pada

bulan Februari 2021 dan November 2021 masing-masing sebesar Rp15 triliun. Selain itu juga pengalihan (Inbreg) sebagian saham seri B milik Negara di Bank Mandiri dan Bank BRI senilai Rp45 triliun pada bulan Desember 2021. Adapun pada laporan keuangan tahun 2021, INA memiliki total aset senilai Rp 79,22 triliun, serta berhasil membukukan laba bersih senilai Rp 231,2 miliar tahun 2021. Adapun Sepanjang 2021 INA berhasil menjaring komitmen investasi dari berbagai investor global senilai lebih dari Rp300 triliun untuk sektor transportasi, logistik, kemaritiman, hingga infrastruktur digital. Selain itu, INA juga sedang melakukan rangkaian proses investasi di sektor layanan kesehatan dan terlibat aktif dalam pembicaraan di sektor *Energy Transition Mechanism* (ETM).

SMV

adalah Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Lembaga yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan tugas pembangunan. Diantaranya PT SMI, PT PII, PT SMF, PT GDE, dan LPEI.

PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dibentuk dengan tujuan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur

melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/ atau lembaga keuangan multilateral.

LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) atau Indonesia Eximbank (IEB) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional (PEN).

PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) atau juga dikenal Indonesia *Infrastructure Guarantee Fund*, dibentuk untuk memberikan penjaminan Pemerintah atas proyek infrastruktur Pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU.

PT SMF (Sarana Multigriya Finansial) dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan melalui dukungan ketersediaan dana bagi pembangunan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

PT GDE (Geo Dipa Energi) mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berasal dari energi panas bumi.

KPBU

merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang bertujuan untuk kepentingan umum (dengan mengacu pada

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/BUMN/ BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak)

Blended Financing

dilaksanakan untuk menemukan struktur pembiayaan yang optimal untuk proyek infrastruktur (pengaturan sumber pendanaan publik dan swasta dalam satu proyek), yaitu Anggaran Pemerintah (Pusat dan Daerah), Sektor Swasta, Donor (Badan Pembangunan) dan Filantropis.

Dari skema-skema diatas, skema KPBU merupakan alternatif utama yang akan dikembangkan menjadi suplemen untuk APBN bagi pembangunan Infrastruktur. Hal ini dikarenakan Skema KPBU tersebut dapat menjadi tulang punggung dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur secara **blended finance**. Adapun tujuan dibentuknya skema KPBU diantaranya (1) mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta, (2) penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, (3) menciptakan iklim Investasi yang mendorong partisipasi

Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, serta (4) memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha. Sementara itu beberapa kelebihan penggunaan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur diantaranya (1) fokus pengadaan pemerintah hanya pada penyediaan layanan infrastruktur (2) terdapat pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha (3) Kontrak yang ditandatangani pemerintah merupakan kontrak tunggal dengan badan usaha untuk seluruh kegiatan penyediaan infrastruktur, serta (4) memungkinkan bagi badan usaha untuk melakukan inovasi sehingga mendorong efisiensi.

Guna mendorong dan menarik minat swasta untuk mendukung pembangunan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa dukungan fiskal untuk skema KPBU, diantaranya melalui

1. Project Development Facility (PDF)

Fasilitas untuk mendukung K/L atau Pemda dalam persiapan dan transaksi proyek

2. Land Acquisition Funding

Fasilitas pendanaan proses pengadaan tanah

3. Viability Gap Fund (VGF)

Dukungan fiskal untuk sebagian biaya konstruksi

proyek yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial.

4. **Availability Payment (AP)**

Dukungan/pembayaran atas layanan yang telah disediakan badan usaha/swasta

5. **Penjaminan**

Penyediaan penjaminan untuk proyek KPBU melalui PT PII atau bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah

6. **Dukungan fiskal lainnya**

Peraturan penggunaan aset pemerintah, Insentif perpajakan, Koordinasi dukungan anggaran pusat-daerah

KPBU dengan Partisipasi Swasta

Dengan KPBU, memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur cukup masif, hal ini karena pemerintah cukup menyediakan hal yang bersifat dukungan bagi kelangsungan proyek. Sehingga dengan pengeluaran pendanaan yang minimal, pemerintah dapat mendorong pembangunan infrastruktur. Hal ini sangat menguntungkan karena dengan pembangunan infrastruktur yang masif, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat

bawah. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat bawaaah serta lancarnya jalur distribusi barang akan meningkatkan transaksi ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat dan mencegah *middle income trap*.

SDG Indonesia One

Selain melalui KPBU, Pemerintah juga telah mengembangkan pembiayaan kreatif lain salah satunya dengan SDG Indonesia One. SDG Indonesia One merupakan platform **blended finance** yang mendukung pembangunan infrastruktur dalam mencapai 16 tujuan dari 17 tujuan SDG. Skema **blended finance** yang dikelola oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai SDGs dari berbagai sumber: filantropis, donor internasional, lembaga pembiayaan iklim, investor hijau, bank komersial, Multilateral Development Banks (MDBs)

KPBU dengan partisipasi Filantropi

Indonesia dinobatkan menjadi negara paling dermawan pada tahun 2020 oleh World Giving Index pada 2021. Berdasarkan hal tersebut, sangat memungkinkan untuk mengajak filantropi turut serta dalam pembangunan. Untuk itu skema **Blended Financing** yang berupa KPBU dengan

bentuk dukungan kelayakan/*Viability Gap Fund* (VGF) dari dana Filantropi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditawarkan. Adapun mekanismenya adalah dana hibah Filantropi dapat menggantikan dukungan kelayakan pemerintah yang berupa sebagian biaya konstruksi. Sehingga dalam hal ini pemerintah menjadi jembatan penghubung antara filantropi dan Swasta. Dengan skema KPBU dengan partisipasi filantropi setidaknya akan memberikan manfaat yaitu (1) membuka peluang Filantropi untuk turut menyediakan infrastruktur bagi masyarakat, (2) menurunkan biaya proyek yang harus ditanggung pihak swasta, serta (3) meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU sehingga menimbulkan minat dan partisipasi pihak swasta.

Namun demikian untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang cepat, massif dan merata masih terbuka ruang untuk pengembangan instrumen pembiayaan innovative lain. Sehingga memungkinkan seluruh komponen bangsa dapat turut serta membangun infrastruktur untuk kemajuan bangsa.



Ekonomi Inklusif: Paradigma Pembangunan Ekonomi yang Lebih Holistik

Apri Prayoga Arrfah⁵

APBN 2023 telah ditetapkan dengan mengusung tema kebijakan fiskal berjudul “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pemerintah menjelaskan bahwa tema tersebut menggarisbawahi pentingnya sektor produktif untuk melakukan reformasi dan transformasi ekonomi. Adapun jika dicermati lebih jauh, dari tema tersebut

didapati satu kata kunci yang cukup menarik, yakni kata ‘inklusif’. Lalu, ada apa dengan ekonomi yang inklusif dan mengapa ekonomi perlu diarahkan menjadi inklusif?

Sebagaimana telah menjadi asumsi umum, bahwa angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama pengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Hal tersebut dilandasi teori bahwa

pertumbuhan ekonomi merepresentasikan nilai tambah barang dan jasa yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Lebih lanjut, kebijakan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak lepas dari harapan bahwa pertumbuhan tersebut akan memberi stimulus bagi perekonomian di bawahnya, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan berbagai

⁵Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

peluang ekonomi, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesetaraan distribusi kekayaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam teori *trickle-down effect* atau dampak tetesan ke bawah yang digagas oleh ekonom Albert Hirschman (1915-2012).

Namun demikian, teori tersebut bukan tidak memunculkan kontra. Di antara kritik yang mengemuka dari para ekonom adalah bahwa *trickle-down effect* dapat meningkatkan ketimpangan antar lapisan masyarakat, dikarenakan kapasitas kelompok pertama yang menikmati pertumbuhan justru semakin besar. Disamping itu, ada pula temuan bahwa peningkatan bagian pendapatan masyarakat miskin dan kelas menengah sejatinya dapat mendorong pertumbuhan. Sedangkan peningkatan bagian pendapatan masyarakat 20 persen kalangan teratas menghasilkan pertumbuhan yang lebih rendah. Artinya, ketika orang kaya semakin kaya, manfaatnya tidak mengalir ke bawah⁶.

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bicara tentang pertumbuhan ekonomi, dengan tren pertumbuhan yang cukup baik dalam dua dekade terakhir, Indonesia cukup diperhitungkan sebagai potensi kekuatan ekonomi di masa depan. Bahkan

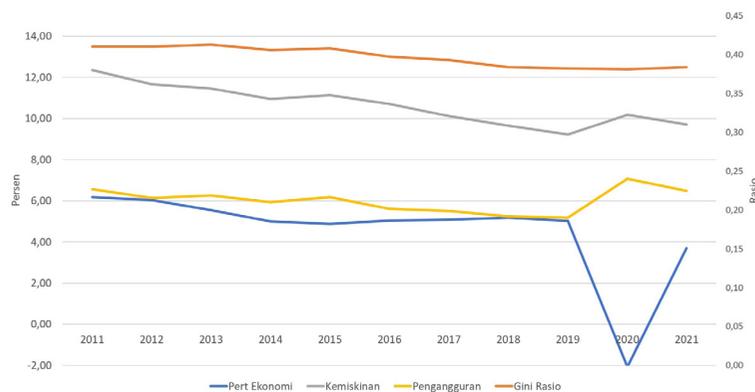
diprediksi akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia pada tahun 2030.

Secara kualitas pertumbuhannya, data historis dalam dua dasawarsa terakhir (Grafik 1) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Meski demikian, tren ketimpangannya cenderung stagnan. Data tersebut memberi sinyal bahwa

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga mampu menggambarkan pertumbuhan yang bersifat *pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-equity*.

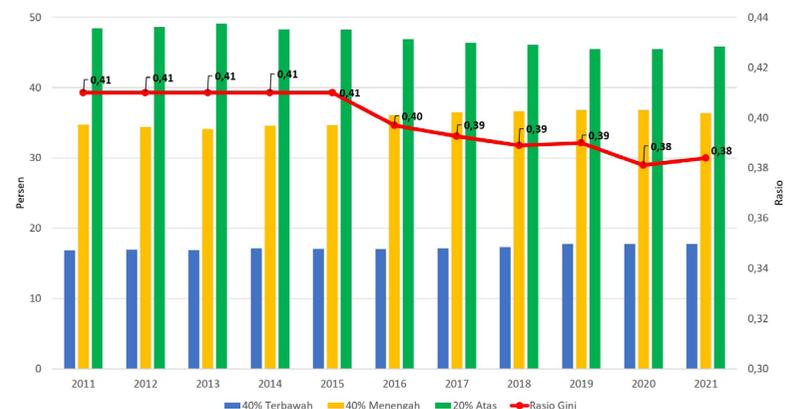
Selanjutnya, dari sisi dimensi ketimpangan antar-kelompok pendapatan, data 10 tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam grafik 2 menunjukkan bahwa secara umum kelompok 20% teratas masih mendominasi distribusi pengeluaran per kapita.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan Rasio Gini (2011-2021)



Sumber: CEIC, diolah

Grafik 2 Distribusi Pengeluaran Perkapita dan Rasio Antara Kelompok Pengeluaran (2011-2021)



Sumber: BPS, diolah

⁶IMF, 2015. Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Causes-and-Consequences-of-Income-Inequality-A-Global-Perspective-42986>.

Namun sejak tahun 2014, distribusi pengeluaran 20% kelompok teratas cenderung menurun, sementara kelompok 40% menengah dan 40% terbawah relatif meningkat. Hal ini kemudian linier dengan penurunan Gini Rasio, meskipun kembali meningkat pada 2020 dan 2021 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan distribusi pengeluaran kelompok menengah dan terbawah memegang peran yang signifikan dalam menurunkan rasio gini. Meski demikian, hipotesis ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money*, JM Keynes mengatakan bahwa "*The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and incomes*". Maka hingga kini, isu hubungan ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi pembahasan yang menarik di antara para ekonom. Hubungan yang kemudian dijelaskan dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif; suatu paradigma pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, namun juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi

tersebut dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat secara adil.

OECD mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara adil di seluruh masyarakat dan menciptakan peluang bagi semua. Adapun Bappenas menjelaskan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat inklusifitas perekonomian, belum ada standar baku satu metode pengukuran yang disepakati secara umum. Namun demikian, setidaknya ada dua metode pengukuran yang cukup populer digunakan oleh para peneliti belakangan ini.

Metode pertama adalah *PEGR (Poverty-Equivalent Growth Rate)* yang dirumuskan oleh Stephen Klasen sebagai adaptasi penelitian sebelumnya, dalam *ADB Sustainable Development Working Paper Series No.12 (2010): Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. Konsep metode ini mengukur manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin.

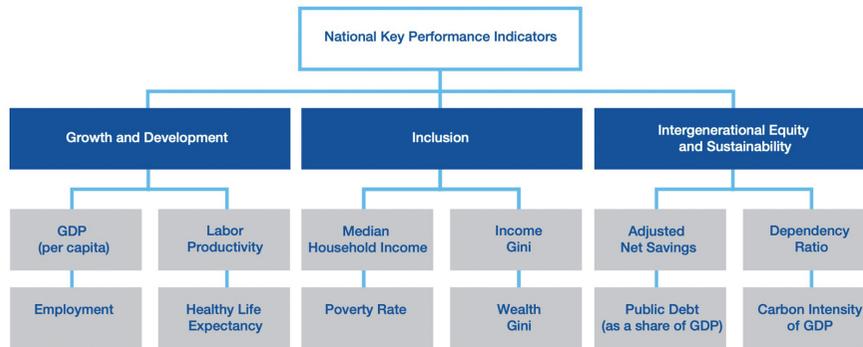
Kedua, pendekatan *Social Mobility Curve* yang dirumuskan oleh Rahul Anand et al. dalam *IMF Working Paper WP/13/135 (2013): Inclusive Growth: Measurement and Determinant*, di mana metode tersebut menjelaskan bahwa tingkat keinklusan pertumbuhan ekonomi tergantung dari dua faktor, yakni pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan.

Inklusifitas Ekonomi Indonesia

Di level global, *World Economic Forum* memublikasikan *The Inclusive Development Index (IDI)* sebagai asesmen terhadap kinerja suatu negara dalam berbagai dimensi progress ekonomi sebagai alternatif dari PDB. Dalam publikasi terakhirnya di tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-36 dari 74 negara berkembang yang dinilai. Posisi tersebut berada di bawah Malaysia (13), Thailand (17), China (26), dan Vietnam (33). Namun masih lebih baik dibandingkan Brazil (37), India (62), dan Afrika Selatan (69).

Dalam laporan tersebut, WEF menyoroti tingginya disparitas pendapatan di Indonesia yang menyebabkan pilar *inclusion*-nya sangat rendah, yakni berada pada ranking 61. Catatan lainnya adalah tingginya intensitas karbon ekonomi Indonesia (peringkat ke-55) dan hampir dua kali lipat nilai median negara-negara berkembang.

Gambar 1 Indikator Kunci Kinerja *Inclusive & Development Growth*



Sumber: *World Economic Forum*

Adapun nilai pendukung dari inklusifitas Indonesia menurut WEF adalah pada pilar *Intergenerational Equity and Sustainability*. Hal ini disebabkan tingkat utang publik yang rendah, rasio ketergantungan yang relatif rendah, dan *adjusted net savings rate* yang tinggi. Sayangnya, kondisi yang dilaporkan tersebut adalah

atas data tahun 2018, dan hingga kini WEF belum merilis *IDI Report* terbaru.

Pada level domestik, sejak tahun 2017 pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengembangkan konsep dan pengukuran pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

Hasilnya dituangkan dalam suatu alat ukur yang disebut IPEI (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif) dengan data yang dipublikasikan secara tahunan pada level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

IPEI dibentuk dari 3 pilar yang terdiri dari 8 sub pilar dan 21 indikator. Pilar pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang meliputi sub pilar pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi. Selanjutnya, pilar kedua adalah pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang terdiri atas sub pilar ketimpangan dan kemiskinan. Sementara pilar ketiga merupakan perluasan akses dan kesempatan yang meliputi sub pilar kapabilitas manusia, infrastruktur dasar, dan keuangan inklusif. Secara lebih lengkap, indikator pembentuk IPEI dapat dilihat pada Gambar 2.

Selanjutnya pengukuran IPEI menghasilkan skala nilai indeks pada rentang 1 s.d. 10, di mana nilai 1 s.d. 3 merupakan kategori "tidak memuaskan", nilai 4 s.d. 7 merupakan kategori "memuaskan", dan nilai 8 s.d. 10 merupakan kategori "sangat memuaskan".

Dalam data IPEI yang dirilis Bappenas tersebut, pada grafik 3 terlihat bahwa tren pembangunan ekonomi inklusif Indonesia mengalami peningkatan, di mana pada 2011 indeks inklusif nasional tercatat sebesar 4,79,

Gambar 2 Pilar Pembentuk IPEI

PILAR 1: PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN (0,5)	PILAR 2: PEMERATAAN PENDAPATAN & PENGURANGAN KEMISKINAN (0,25)	PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN (0,25)
Sub Pilar 1.1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi (0,33)	Sub Pilar 2.1: Ketimpangan (0,5)	Sub Pilar 3.1: Kapabilitas Manusia (0,33)
Pertumbuhan PDRB Riil Per Kapita	Rasio Gini	Harapan Lama Sekolah
Share Sektor Manufaktur terhadap PDRB	Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nasional	Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Sub Pilar 1.2: Kesempatan Kerja (0,33)	Sub Pilar 2.2: Kemiskinan (0,5)	Sub Pilar 3.2: Infrastruktur Dasar (0,33)
Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak
Persentase Penduduk Bekerja dengan Jam Kerja \geq 35 Jam per Minggu	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari	Persentase RT dengan Fasilitas Tempat BAB Sendiri
Sub Pilar 1.3: Infrastruktur Ekonomi (0,33)		Sub Pilar 3.3: Keuangan Inklusif (0,33)
Persentase RT yang menggunakan listrik/PLN		Rasio Jumlah Rekening DPK dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia Produktif
Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Genggam		Rasio Jumlah Rekening Perbankan UMKM terhadap Rekening Kredit secara Keseluruhan
Total Jalan dengan kondisi baik dan sedang/luas wilayah		

meningkat menjadi 6,00 di tahun 2021. Apabila dirinci per pilar, maka pertumbuhan yang relatif konsisten terjadi pada pilar 2. Sementara dari pembentuk IPEI akumulatif, dominasi dan kontribusi masing-masing pilar cenderung variatif dari tahun ke tahun. Namun, sejak tahun 2014 pilar 1 menunjukkan kontribusi yang paling rendah diantara kedua pilar lainnya.

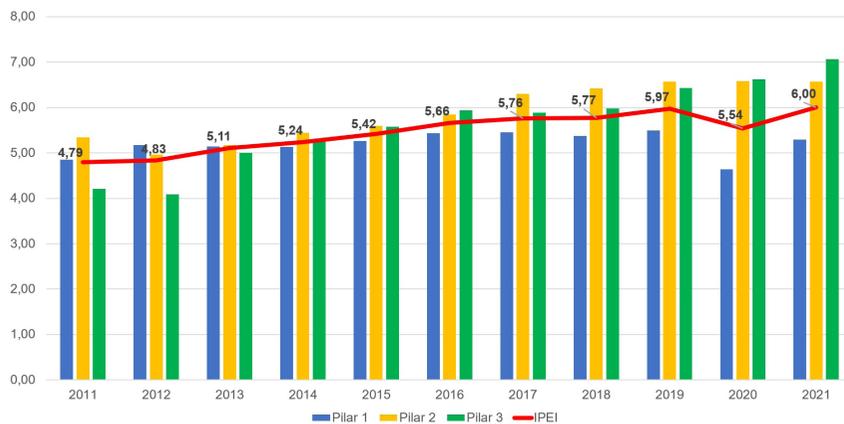
provinsi yang mencatatkan nilai IPEI yang lebih rendah dibanding rata-rata nasional, justru memiliki pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibanding rata-rata. Misalnya Gorontalo (5,61) sebagai provinsi dengan IPEI terendah keempat pada 2021, namun menjadi provinsi dengan rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi keenam dengan 5,94% pada kurun waktu

Paradigma Pembangunan Holistik

Fenomena tingginya pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan sosial secara linier kemudian memunculkan pertanyaan tentang dampak pertumbuhan tersebut terhadap masyarakat di berbagai kelas sosial, khususnya kalangan menengah dan bawah.

Sementara, pembangunan ekonomi inklusif yang diukur dengan berbagai variasi indikator pembentuk dan metodenya, merepresentasikan kinerja pembangunan yang lebih holistik. Oleh sebab itu, paradigma pembangunan ekonomi idealnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan pembangunan yang inklusif melalui bauran kebijakan yang dapat mendorong pemerataan distribusi kekayaan nasional. Dengan tema yang diusungnya, APBN 2023 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat inklusifitas ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

Grafik 3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia (2011-2021)



Sumber: Bappenas, diolah

Selanjutnya pada level daerah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan pembangunan ekonomi inklusif terbaik dengan rata-rata nilai IPEI sebesar 7,08 pada tahun 2011 sampai 2021. Disusul Bali (6,31) dan DI Yogyakarta (6,26). Sementara provinsi dengan tingkat inklusifitas ekonomi terendah terjadi di Papua dengan rata-rata IPEI 10 tahun terakhir sebesar 3,14. Disusul NTT (4,47) dan Papua Barat (4,65).

Lebih lanjut, beberapa

2011-2021. Setali tiga uang, IPEI Maluku sebesar 5,63 menempatkannya di posisi 5 terbawah, namun rata-rata pertumbuhan PDRB Maluku selama satu dekade terakhir dengan 5,08% menempatkannya di 10 besar provinsi dengan pertumbuhan PDRB terbaik. Kondisi ini menjadi sedikit gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin pemerataan manfaat yang diterima masyarakat ditinjau dari aspek inklusifitas ekonomi.

Daya Tahan, Visi Besar, dan Restu Ibu adalah Kunci

Rosyid Bagus Ginanjar⁷



Filosofi Marathon: Daya Tahan

Tak ada yang berbeda dari keseharian Mas Prof saat Tim Redaksi Warta Fiskal berkunjung ke kantor barunya di Kampus Badan Riset Nasional (BRIN) Gatot Soebroto di bilangan Jakarta Selatan. Ia terbiasa berolahraga lari pagi sebelum memulai aktivitas lainnya. Mas Prof adalah panggilan akrab yang diberikan oleh anggota (Lapangan) *Banteng Runners*.

Julukan itu diberikan sebagai bentuk respek kepada sosok peneliti yang super sibuk namun selalu meluangkan waktu berlari bersama para

pelari lainnya. Pria bernama lengkap Irwanda Wisnu Wardhana ini memang terkenal aktif di dunia lari dan sudah mengikuti beberapa ajang marathon internasional di Jakarta, Bali, dan Singapura.

"Saya menyukai marathon karena filosofinya yaitu daya tahan, selalu saya gunakan dalam bekerja. Bahwa puluhan kilometer itu diawali dari satu langkah kecil pertama. Tidak perlu tergesa-gesa, cukup konsisten berlari, jangan *quit*, *taking break* saat lelah, dan *finish* sebelum *cut-off time*. Demikian pula dalam bekerja, bekerja konsisten sampai tuntas dalam waktu

yang panjang," ungkap pria berkacamata kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 42 tahun lalu.

Belajar dari Tokoh Dunia: Tiada yang Tidak Mungkin!

Banyak kolega yang belum tahu bagaimana sosok Mas Prof tumbuh dari keluarga *broken home* sejak usia 6 tahun. Dari sinilah kemudian peran Sang Ibu sangat besar dan dominan sebagai madrasah pertama. Sang Ibu yang hanya lulusan SMA tidak menargetkan banyak hal kepadanya akan menjadi apa dan bagaimana. Ia hanya memberi kebebasan dan

⁷Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

batasan baik-buruk setiap tindakan. Putranya bebas mendefinisikan wejangan itu seperti apa asalkan tidak melanggar aturan agama dan negara.

Mas Prof memang tidak mendapatkan figur seorang ayah kandung di rumah namun ia memperoleh kehangatan seorang bapak dari profil tokoh dunia melalui buku. Ia menjadikan masjid dan perpustakaan daerah di Kota Pematang Siantar sebagai rumah keduanya. Dari buku-buku biografi yang dilahapnya, ia mendapatkan petuah kepemimpinan dari bapak bangsa dan dunia secara langsung lewat tulisan.

“Saya selalu percaya bahwa kunci sukses itu adalah restu Ibu. Sebagaimana surga di bawah telapak kaki ibu, begitu pula sukses kita tergantung kepada doa dan sayang ibu kepada kita,”

Figur tokoh dunia itu seperti menuntun Mas Prof agar mengikuti jejak mereka menjadi seorang pemimpin. Tekad itu sudah terbangun sejak dini dan melekat secara otomatis dalam alam bawah sadarnya. Ia berusaha mempelajari manajemen konflik dari tokoh

tersebut. Bagaimana mereka memiliki visi yang besar, dan bagaimana mereka menangani isu-isu yang dihadapi beserta pemecahan masalahnya.

Terinspirasi dari para tokoh tersebut, ia sudah terbiasa menuliskan target hidupnya sejak di bangku SMP. Targetnya yang kuat ingin masuk kampus besar di Indonesia. Kemudian, di dinding triplek kamar tidurnya, ia tuliskan cita-cita menjadi profesor dan doktor. Bahkan, di meja belajarnya, ia goreskan niat menjadi presiden.

Restu Ibu adalah Kunci

Walaupun sangat ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri terkemuka, namun di tahun 1998 terjadi krisis moneter yang menghantam daya beli masyarakat tak terkecuali keluarga Mas Prof. Walaupun diterima di salah satu universitas besar, Sang Ibu yang juga pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sangat berharap putra pertamanya dapat kuliah dengan murah dan menjadi pegawai negeri. Maka saat Mas Prof diterima di program Diploma III Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN), Sang Ibu meloncat kegirangan dan Mas Prof pun akhirnya menuruti keinginan bundanya.

“Saya selalu percaya bahwa kunci sukses itu adalah restu Ibu. Sebagaimana surga di bawah telapak kaki ibu, begitu

pula sukses kita tergantung kepada doa dan sayang ibu kepada kita,” kenangnya.

Walaupun tidak menyukai ilmu akuntansi, namun Mas Prof sangat menikmati peran sebagai aktivis mahasiswa. Sejak hari pertama, ia aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa dan mengikuti berbagai kegiatan sosial penuh idealisme anak muda. Tidak terasa, tiga tahun berlalu, ia sudah menjalani berbagai amanah termasuk Wakil Ketua BEM. Setelah menggondol gelar Ajun Akuntan di tahun 2001, ia berdinastikan sebagai auditor di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Untuk menggenapkan karir sebagai aktivis mahasiswa, ia bertekad menuntaskan pendidikan di kampus yang sama agar dapat menjadi Ketua BEM yang kemudian disebut sebagai Presiden Mahasiswa. Mas Prof melanjutkan studi Diploma IV di tahun 2003 setelah jeda dua tahun bekerja. Selama dua tahun studi, bukan saja menjadi Presma, ia juga menjadi pendiri dan ketua pertama Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia yang beranggotakan lebih dari seratus organisasi mahasiswa perguruan tinggi kedinasan.

“Karena sibuk berorganisasi, sampai-sampai dosen saya menyampaikan prediksi bahwa saya tidak akan pernah bisa kuliah S2 apalagi S3, apalagi ke luar negeri,” tambah Wakil Ketua Ikatan Alumni STAN periode 2019-2022 tersebut.



Namun, prediksi itu meleset ketika di tahun 2010, ia menyelesaikan program Master Kebijakan Publik di Hitotsubashi University Tokyo – Jepang dan di tahun 2016 menuntaskan program Doktor Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik di University of Texas at Dallas – Amerika Serikat.

Jangan Menjadi *Quiter* atau *Camper*, jadilah *Climber*

Setelah berkarir 20 tahun di Kementerian Keuangan, Mas Prof memutuskan berpindah organisasi menjadi pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) per 1 Januari 2022. Pada tanggal 8 April 2022, ia dilantik menjadi Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan.

“Sampai hari ini saya selalu merasa sebagai pegawai Kemenkeu. Perkenalkan, saya pegawai Kemenkeu sebelum hijrah ke BRIN. Saya Bea Cukai Diaspora. Pokoknya, Kemenkeu selalu

di hati,” katanya bangga pernah menjadi bagian dari BKF Runners dan tentunya keluarga Badan Kebijakan Fiskal.

Terkait keputusan mengambil langkah berani dalam berkarir, ia memberikan analogi hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Menurut pecinta soto ayam itu, hijrah nabi sekaligus memantapkan strategi perjuangan dan memanfaatkan momentum yang ada di zaman itu.

“Kita harus berani mengambil risiko. Berani menjadi pendaki atau *climber*. Jangan menjadi *quitter* atau mundur ketika menghadapi masalah. Atau menjadi *camper* yang terlalu nyaman dengan situasi saat ini. Jangan takut penghasilan berkurang karena dampak keputusan kita karena yakinlah bahwa rezeki itu dari Allah SWT,” tutur pria yang belakangan hobi kulineran sambil mempromosikan usaha kecil lokal di media sosial instagram [@irwandawisnu](#).

Jangan Ragu, Raih Masa Depanmu

Untuk mencapai masa depan yang cerah, ia berpesan agar anak muda dapat mengenali dan menilai diri sendiri dengan tepat. Setelah mengenal diri, perkokoh kekuatan diri dan jadilah yang paling baik. Namun jangan lupa integritas, kerja sama tim, dan loyal kepada pimpinan. Mengapa? Karena sukses tidak bisa sendirian. Harus dilakukan secara bersama-sama.

Selain itu, berbekal pada pengalaman diri sendiri, Mas Prof menambahkan bahwa diperlukan visi yang besar sebagai mesin pendorong. Juga kecerdasan berupa daya tahan kemalangan (*adversity quotient*) yang membuat kita menjadi sosok tangguh. Serta restu dari orang terdekat khususnya Ibu.

“Apa yang kita cita-citakan suatu saat bisa terwujud, pasti ada jalan. Mestakung, semesta mendukung. Motto yang saya gunakan dan terbukti adalah – *if you think you can, you can*. Kalau orang belum meragukan atau menertawakan cita-cita kita, berarti cita-cita tersebut belum menantang. Coba tetapkan target yang menantang untuk menyemangati kita,” pungkasnya menutup diskusi yang hangat dan bersemangat.

Semoga Mas Prof selalu menjadi sosok yang bersemangat dan selalu dapat menularkan energi positifnya.



Maafkan Dirimu!

Indrawan Susanto⁸ & Chintya Pramasanti⁹

Setiap hari, manusia selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Mulai dari memilih moda transportasi untuk berangkat ke kantor, pilihan menu makan siang, atau memilih pulang lebih awal atau lebih malam untuk menghindari macet jalanan. Untuk hal-hal yang lebih serius, kita pun selalu 'dipusingkan' dengan berbagai macam pilihan hidup. Permasalahannya adalah kita tidak akan pernah punya pengetahuan yang sempurna atas pilihan yang akan kita akan ambil. Apakah hal tersebut akan membawa pada hal yang baik atau justru sebaliknya. Andai pun, setelah pilihan diambil, dan hal tersebut membawa kepada hal yang kurang mengenakan, akan selalu ada pepatah yang menghibur hati kita, *'segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik dari Tuhan'*.

Mari jujur dan akui, tanpa pilihan-pilihan itu pun, pada dasarnya kita adalah manusia. Kita hidup untuk pertama

dan terakhir kalinya. Tidak ada remedial. Tidak ada *try out* terlebih dahulu di masa sebelumnya. Kita sama-sama menjalani hidup ini tanpa pernah tahu akan berakhir seperti apa nantinya.

Menjadi manusia berarti pada satu titik dalam hidup, kita pasti akan berbuat salah. Salah belok, lupa mengerjakan tugas, marah tak terkendali, dan hal-hal 'salah' lainnya. Jika dikaitkan dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk sosial, maka seharusnya kita juga dapat memahami bahwa pada satu titik, kita akan dikecewakan oleh kesalahan orang lain terhadap kita dan juga sebaliknya.

Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, tidak jarang berujung pada tragedi kehidupan. Menangis sampai kepala pusing, depresi, menyalahkan diri sendiri, hingga mengurung dan merutuki diri. Yang lebih parah, ada yang mengakhiri hidupnya, sebagian lain bahkan sampai hati untuk

mengakhiri hidup orang lain.

Pepatah bilang, kita akan menjadi orang yang berbahagia jika kita dapat memaafkan kesalahan orang lain dan berdamai dengannya. Bila dengan ringannya kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, mari kita juga belajar untuk memaafkan diri sendiri. Mari sadari bahwa kita semua manusia yang hanya dapat berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Satu hari kita berbuat salah, esoknya kita bisa menjadi manusia yang lebih bijak. Jika sudah begitu sesak, jangan sungkan untuk mencari pertolongan kepada seorang profesional yang dapat membantu situasi jadi lebih melegakan.

Tidak ada orang yang senang berbuat salah, namun itu menjadi petunjuk bahwa kita adalah pembelajar. Hingga habis usia kita, selalu ingat: terima fakta bahwa kita tidak sempurna dan berdamailah dengan diri sendiri. Maafkan dirimu

^{8,9}Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal



Setelah hampir 3 tahun pandemi, banyak orang ingin kembali melakukan wisata baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Untuk luar negeri, Negeri Sakura atau Jepang adalah salah satu *top of mind* bagi warga Indonesia yang ingin berpergian keluar negeri. Selain jarak yang tidak terlalu jauh, Jepang adalah negara Asia yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Kita dapat dengan mudah menjumpai berbagai jenis budaya dan pengaruh Jepang dalam kehidupan sehari-hari mulai dari makanan, produk-produk elektronik hingga film dan animasi yang menemani kita semenjak kecil. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sedikit cerita menarik perihal pengalaman menjelajahi Jepang beberapa waktu yang lalu, *ただかいます!* (*itadakimasu*, re: selamat menikmati).

Apakah yang ada dipikiran kita ketika muncul kalimat “jalan-jalan ke Jepang”? Sebagian besar dari kita tentunya akan berpikir tentang Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Tentu hal tersebut sangat wajar mengingat tiga kota ini merupakan tiga kota besar yang dapat dengan mudah kita temui ulasan dan video promosi wisatanya baik di media sosial maupun media digital lainnya. Akan tetapi, ketiga kota tersebut adalah bagian dari Pulau Honshu yang hanyalah satu dari empat pulau utama di Jepang. Tiga pulau lainnya yang tidak kalah menarik adalah Shikoku, Hokaido, dan Kyushu.

Selain Pulau Honshu, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar beberapa hal mengenai Pulau Hokaido. Pulau ini terkenal dengan salju yang tebal selama musim dingin dan produk olahan susu sapi yang premium. Lalu bagaimana

dengan Pulau Kyushu? Adakah yang Anda ketahui tentang pulau tersebut? Mungkin ketika saya menyebutkan kota Nagasaki dan Fukuoka Anda tidak sadar bahwa kedua kota tersebut terletak di Kyushu, pulau utama yang paling selatan di Jepang. Kedua kota tersebut memiliki beberapa “*hidden gem*” yang tidak hanya dapat kalian temukan di kota lain. Jadi, pastikan kalian membaca artikel ini sampai habis karena saya akan ajak Anda berpetualang sejenak di Pulau Kyushu.

Sebagai kota terbesar di daerah Kyushu, Fukuoka merupakan mesin perekonomian di pulau ini. Kalian dengan mudah menemui berbagai kantor perwakilan perusahaan dan gerai-gerai asing di kota ini. Lalu apakah yang spesial dari kota ini? Bagi penggemar makanan Jepang, Ramen adalah makanan Jepang yang

¹⁰Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal



tidak terlewatkan. Daerah Hakata yang masih bagian dari Fukuoka adalah asal dari ramen tersebut. Anda dapat dengan mudah menemui berbagai jenis ramen di kota ini. Untuk Anda yang beragama muslim tidak perlu khawatir karena ada beberapa gerai yang menjual ramen berbahan dasar kaldu dan daging ayam. Selain itu, di Fukuoka kalian dapat dengan mudah menemukan 屋台 (re: yatai) di sekitar area pejalan kaki. Yatai adalah penjaja makanan di ruangan terbuka (biasanya pinggir jalan) dengan konsep yang sangat mirip dengan angkringan di daerah Kota Yogyakarta dan Solo. Kalian dapat menikmati berbagai jenis makanan baik makanan ringan maupun berat ditemani dengan segelas minuman hangat dan keramahan penjual serta warga sekitar.

Selain itu, bagi Anda yang

gemar berbelanja, Fukuoka menawarkan berbagai pusat perbelanjaan dengan konsep yang menarik. Salah satu pusat perbelanjaan yang menarik untuk dikunjungi adalah Canal City. Selain lokasi yang hanya beberapa menit jalan kaki dari stasiun besar Hakata, Canal City menawarkan konsep kanal di tengah pusat perbelanjaan dan pertunjukan air mancur menari pada jam-jam tertentu. Bagi yang gemar berbelanja, periode pergantian musim adalah saat yang terbaik untuk berburu barang-barang yang Anda butuhkan.

Setelah puas berkeliling kota Fukuoka, Anda dapat mengunjungi kota Nagasaki baik dengan Kereta Shinkansen yang baru saja diresmikan atau dengan bus antar kota sebagai opsi paling terjangkau. Tentu Anda tidak asing dengan kota Nagasaki yang menjadi lokasi bom

atom sebagai penutup perang dunia kedua pada tahun 1945. Anda dapat mengunjungi museum yang dibangun khusus untuk memperingati peristiwa berdarah tersebut sekaligus Peace Park yang mempromosikan perdamaian dunia. Selain dipenuhi dengan berbagai jenis bunga, taman tersebut juga menampilkan beberapa karya seni dan fotografi pada saat-saat tertentu.

Alasan lain mengapa kota Nagasaki merupakan kota yang spesial adalah Nagasaki merupakan satu dari dua kota pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan internasional selama hampir 250 tahun (1633-1854). Pada masa tersebut, berbagai perusahaan dagang internasional berlomba memperbesar pengaruh di Nagasaki. Perusahaan dagang paling berpengaruh pada masa-masa tersebut adalah VOC, perusahaan dagang negeri Belanda. Tentu Anda tidak asing dengan VOC karena perusahaan yang sama juga memonopoli perdagangan rempah di tanah air pada masa tersebut. Jika Anda pergi ke museum Dejima yang merupakan miniatur pulau buatan sebagai kantor VOC, Anda akan menemukan ikatan yang kuat antara Indonesia dan Jepang sebagai bagian dari rantai perdagangan internasional melalui VOC. Anda dapat melihat bagaimana Batavia (nama Jakarta pada masa itu) merupakan pelabuhan utama perdagangan internasional di Kawasan

Asia melalui dokumen dan penjelasan audio visual di dalam museum tersebut. Lelah mempelajari sejarah perkembangan Nagasaki, Anda dapat berjalan kaki dari Museum Dejima ke Shinichi Chinatown (kawasan Pecinan) dan menikmati akulturasi budaya Cina dan Jepang dalam bentuk bangunan dan juga kuliner. Salah satu makanan yang wajib dinikmati adalah Champon yang terdiri dari mie, kaldu seafood, serta berbagai jenis protein dan sayuran.

Untuk menutup perjalanan, Anda dapat pergi ke Gunung Inasa dengan menaiki bus kota dan kereta gantung untuk mencapai puncak

tertingginya. Anda dapat menikmati sejuknya udara pegunungan sekaligus indahnya kota Nagasaki dari ketinggian. Datang lah saat menjelang matahari terbenam, Anda akan disuguhi pemandangan kota yang sangat indah disusul kelap-kelip cahaya lampu yang sulit untuk dilupakan. Beberapa situs menetapkan Gunung Inasa sebagai *one of the best three night view* di dunia selain Hongkong dan Monako.

Sebagai penutup, kedua daerah tersebut sangat ramah terhadap turis asing sehingga Anda tidak perlu ragu untuk mengunjunginya. Akan tetapi, tidak ada salahnya untuk mempelajari percakapan

sederhana yang akan sangat membantu Anda selama melakukan perjalanan. Selanjutnya, dengan status sebagai wisatawan asing, Anda dapat membeli Kyushu Rail Pass yang memberikan Anda akses ke berbagai jenis kereta di bawah perusahaan JR Kyushu termasuk Kereta Shinkansen dan berbagai jenis kereta wisata yang sangat sayang untuk dilewatkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Saran saya, kunjungi kedua daerah tersebut pada saat musim semi atau gugur karena seluruh taman kota akan sangat cantik dengan warna-warni bunga dan daun.





Ingin Ekspor Impor Semakin Lancar, Pemerintah Terbitkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022

Jakarta (01/04): Pemerintah akan mengimplementasikan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 pada 1 April 2022. BTKI memuat struktur bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor, yang digunakan sebagai salah satu dasar kebijakan fiskal dan non-fiskal, termasuk ketentuan larangan pembatasan, statistik, origin dan kepentingan lainnya. Pemilihan besaran tarif tersebut berdasarkan usulan K/L Pembina Sektor. Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan K/L lain dalam perumusan peraturan terkait, sehingga regulasi antar K/L selaras dan semakin memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan perdagangannya.

Di tengah dinamika perdagangan internasional, kondisi ekspor dan impor Indonesia cukup resilien. Bahkan, ekspor Indonesia tumbuh ekspansif pada 2021 dan awal 2022. Di awal 2022, dengan pemulihan yang semakin kuat, Indonesia perlu perdagangan yang semakin lancar. Salah satu hal yang penting dilakukan adalah dengan menyesuaikan sistem kepabeanan kita agar semakin mengikuti ketentuan internasional.

“Upaya ini dimaksudkan agar ekspor dan impor semakin mudah. Hal ini tertuang dalam sistem klasifikasi barang sesuai amandemen HS yang umumnya disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang mengacu pada uraian barang atau kode HS dari *World Customs*

Organization (WCO) dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature* (AHTN) yang diperbarui secara berkala tiap 5 tahun,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, perdagangan global juga semakin berkembang. Banyaknya inovasi memunculkan berbagai macam barang baru yang harus dimasukkan dalam BTKI. Barang-barang yang dapat diklasifikasikan dalam HS harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu antara lain memiliki nilai perdagangan dunia yang cukup besar, merupakan komoditas strategis, termasuk dalam hewan atau tumbuhan yang harus dilindungi, atau barang-barang teknologi terbaru yang sedang berkembang.



Ini Fokus Kebijakan Fiskal 2023

Jakarta (20/05): APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (20/05).

Menkeu mengungkapkan bahwa Tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa berdasarkan tema kebijakan fiskal tersebut, strategi yang

ditempuh Pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk (1) penguatan kualitas SDM; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur; (3) reformasi birokrasi dan regulasi; (4) revitalisasi industri dan; (5) mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Dari sisi pendapatan negara, Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.

"Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak," ujar Menkeu.

Sementara kebijakan belanja negara, diarahkan untuk menghasilkan *output/ outcome* yang berkualitas,

memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.

"Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat," jelas Menkeu.

Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa.

Apa Kabar Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia?

Jakarta (20/06) – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menerima kunjungan studi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung secara tatap muka setelah dua tahun terakhir harus dilakukan secara virtual akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 75 mahasiswa/i yang didampingi dosen dan Kepala Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, Hurchidaman. Mewakili Sekretaris Badan, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Endang Larasati menyambut baik kunjungan ini sebagai sarana diskusi terkait 'Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keuangan Syariah'.

Sesi diskusi menghadirkan dua narasumber *prominent* dari BKF: Analis Kebijakan Ahli Muda, Aep Soleh dan

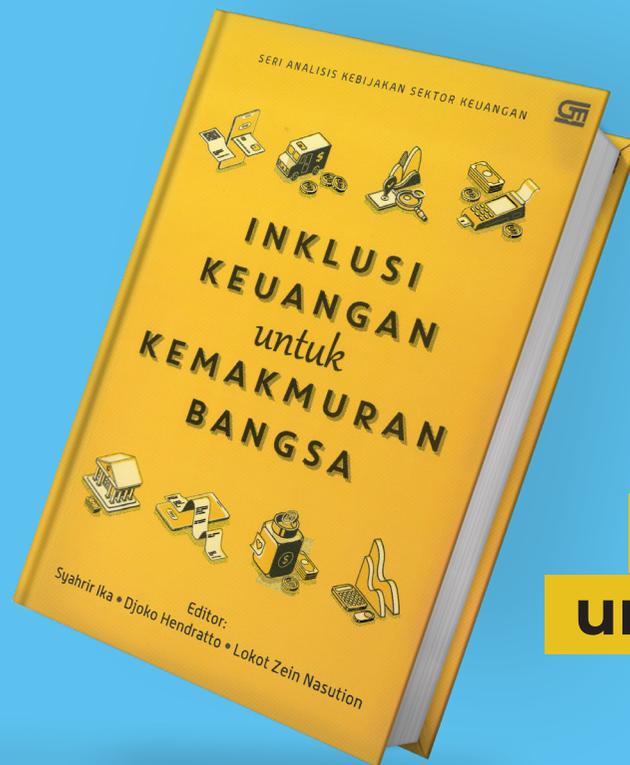
Analis Kebijakan Ahli Pertama, Masyita Mutiara Ramadhan. Diskusi dimoderatori langsung oleh Indha Sendary, Analis Strategi Komunikasi BKF.

Mutiara menjelaskan bahwa Indonesia menempati posisi keempat terbesar dalam perkembangan ekonomi syariah global.

"Beberapa faktor yang menyumbang peningkatan daya saing ekonomi syariah Indonesia di tingkat global, diantaranya: kenaikan ekspor makanan halal yang tinggi ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mencapai 16%, peningkatan kerangka tata kelola dan regulasi industri makanan halal, dan merger Bank Syariah Indonesia (BSI), serta perkembangan teknologi finansial syariah," lanjut Muti.

Tren potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga semakin baik yang dapat dilihat dari pertumbuhan populasi muslim, peningkatan kesejahteraan muslim secara global, peningkatan afinitas agama, konektivitas digital terhadap keuangan syariah yang semakin baik, juga perubahan tren konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk yang memberikan nilai kebermanfaatn sosial maupun lingkungan.

"Indonesia bahkan mendekati negara peringkat pertama terkait *Halal Food* dan *Financial Technology*. Dukungan pemerintah untuk perekonomian syariah melalui regulasi dan kebijakan dari waktu ke waktu pun semakin komprehensif. Ini potensi yang sangat besar untuk Indonesia," tutup Muti.



Inklusi Keuangan untuk Kemakmuran Bangsa

Anggi Pratiwi¹¹

Era Industri 4.0 saat ini sangat memengaruhi sektor perekonomian secara global, khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan kapasitas perekonomian terbesar dan diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi salah satu dari lima negara dengan ukuran ekonomi terbesar. Dengan kapasitas perekonomian yang besar, Indonesia memiliki peluang yang besar pula dalam percepatan dari kesejahteraan penduduknya. Salah satu tantangan Indonesia pada era saat ini ialah akselerasi inklusi keuangan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan agar terdapat peningkatan terhadap

aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang belum “terjamah” dari literasi keuangan untuk mengakses produk dan jasa layanan keuangan formal, baik itu bank maupun non-bank. Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal menganalisis serta merumuskan kebijakan fiskal terkait sektor keuangan untuk menurunkan besarnya *financial inclusion gap* agar pembangunan ekonomi menjadi lebih maksimal.

Buku ini menyajikan artikel-artikel yang disusun dalam enam topik menarik, (1) **Inklusi Keuangan untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia** yang

membahas mengenai pemahaman inklusi keuangan yang merupakan *basic financial service* untuk semua orang. Pemerintah memiliki strategi untuk percepatan inklusi keuangan, yaitu membuka akses layanan keuangan sebanyak mungkin kepada UMKM. Adanya inovasi layanan keuangan yang digabungkan dengan teknologi modern memunculkan *Financial Technology* (FinTech) yang telah banyak bermunculan di Indonesia dan diharapkan dapat menurunkan *financial inclusion gap* yang terjadi di Indonesia.

Topik berikutnya yang dibahas pada buku ini ialah (2) **Benchmarking Strategi**

¹¹Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Nasional dan Best Practice Literasi Keuangan: upaya meningkatkan literasi keuangan di Indonesia yang menjelaskan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya masih terus bergerak maju dalam hal literasi keuangan, masing-masing negara pun memiliki program untuk peningkatan literasi keuangan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan dan hasil survei OECD/INFE menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan inklusi keuangan. Pemerintah telah mengupayakan peningkatan literasi keuangan melalui penetapan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada 2013, pembentukan DNKI, dan penetapan edukasi keuangan sebagai fokus SNKI.

Pada topik ke (3) yang berjudul **Koperasi sebagai Instrumen untuk Mengatasi "Financial Inclusion Gap" di Indonesia** menjelaskan bahwa koperasi memiliki fondasi yang sangat kuat karena berdasarkan UUD 1945 Pasal 3, kedudukan koperasi yang signifikan dalam perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun pada 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun terhadap koperasi dilihat dari beberapa indikator. Koperasi di

Indonesia umumnya memiliki banyak kelemahan yang diperbesar oleh lemahnya pembinaan dan pengawasan koperasi. Terdapat analisis faktor-faktor strategis internal serta eksternal yang menunjukkan bahwa koperasi belum bisa diandalkan untuk menjadi instrument yang efektif untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Topik ke (4) Tata Kelola Hubungan BI dan OJK dalam Mendorong Percepatan Keuangan Inklusif

membahas mengenai peran Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan dalam menjalankan stabilitas keuangan dan moneter, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki peran untuk tetap terfokus pada inklusi keuangan berbasis permintaan dan penawaran. Adanya optimalisasi tata kelola dari kedua lembaga tersebut diperlukan agar tidak terjadi kelengahan urgensi koordinasi di tingkat atas yang melibatkan fungsi BI karena keuangan inklusif memiliki relevansi dengan stabilitas keuangan dan moneter.

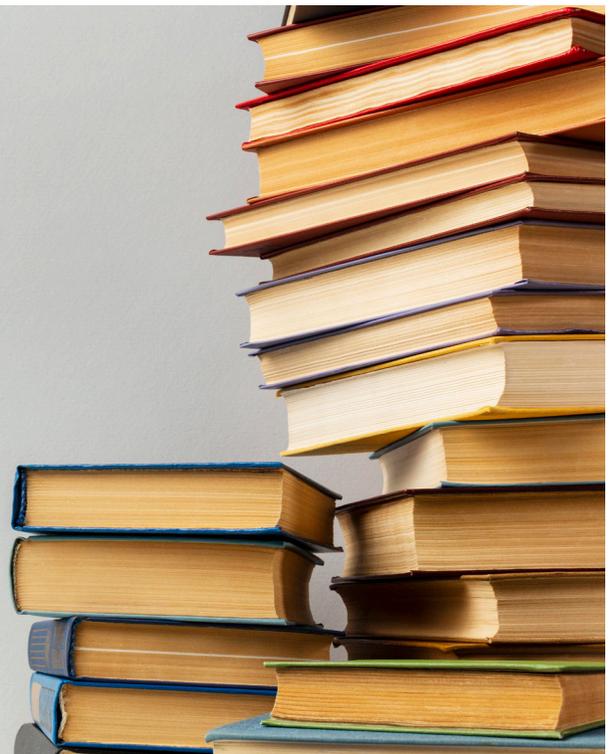
Berikutnya ialah (5) **Strategi Edukasi dan Literasi Keuangan bagi Percepatan Keuangan Inklusif** yang menjelaskan bahwa edukasi dan literasi keuangan memiliki karakteristik yang berbeda namun merupakan satu kesatuan dalam mempercepat keuangan inklusif yang secara tidak langsung berpengaruh dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dalam

menjalankan edukasi dan literasi keuangan di Indonesia ditemukan adanya kompleksitas dan tantangan yang cukup berat dilihat dari faktor kelompok usia, generasi, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan. Namun di beberapa negara kesuksesan edukasi dan literasi keuangan terletak pada ketepatan memetakan karakteristik masyarakat dan produk yang diberikan.

Topik terakhir dalam buku ini (6) **Tingkat Kemiskinan Perempuan Pemilik Rekening Tabungan pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia** memiliki catatan penting yang menyimpulkan bahwa kepemilikan rekening tabungan dari perempuan miskin memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan. Dalam hal ini terlihat pengaruh dari komitmen pelaksanaan literasi keuangan yang berperan penting dalam mempercepat inklusi keuangan.

Dari keseluruhan topik yang disajikan, buku ini sangat menarik untuk dibaca sebagai referensi karena menyajikan berbagai rekomendasi dari para ahli berdasarkan dari hasil kajian dan analisis berbagai tantangan serta isu inklusi keuangan di Indonesia, yang dapat diimplementasikan dalam menyukseskan inklusi keuangan untuk kemakmuran bersama seluruh masyarakat Indonesia. Selamat membaca!

Glosarium



Adversity Quotient

Kecerdasan seseorang dalam menghadapi situasi-situasi-situasi masalah atau kemalangan dalam kehidupan. Dengan *adversity quotient* ini individu dapat mengubah hambatan menjadi peluang karena kecerdasan inipenentu seberapa jauh individu mampu bertahan dalam mengatasi kesulitan

Blended Finance

Sebuah struktur transaksi yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan (publik/filantropi) untuk memobilisasi pembiayaan komersial (publik/swasta)

Countercyclical

Kebijakan anti-siklus bisnis, artinya mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang booming

Core-tax

Pembaruan sistem teknologi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP

Konsolidasi

Sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat

Inclusive Development Index

Alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan

Pro Growth

Konsep yang meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung dan memihak pada pertumbuhan ekonomi

Pro Job

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Pro Poor

Pilihan dan desain yang bersifat politis dan ideologis yang melibatkan pengalokasian dana untuk keluarga-keluarga dan masyarakat miskin

Scarring Effect

Kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya

Shock Absorber

Suatu perangkat mekanik, pneumatik, ataupun hidrolik yang memiliki fungsi utama meredam kejutan dan menambah ketinggian kendaraan

Social Mobility Curve

Kurva yang menjelaskan suatu gerak perpindahan individu, keluarga atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain atau dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata satu ke strata yang lain baik berupa peningkatan atau penurunan status sosial yang dimiliki seperti penghasilan, pekerjaan atau jabatan

Sovereign Wealth Fund

Dana investasi milik pemerintah yang dibentuk untuk aneka macam tujuan ekonomi makro yang merupakan aspek krusial pada sistem moneter serta keuangan internasional

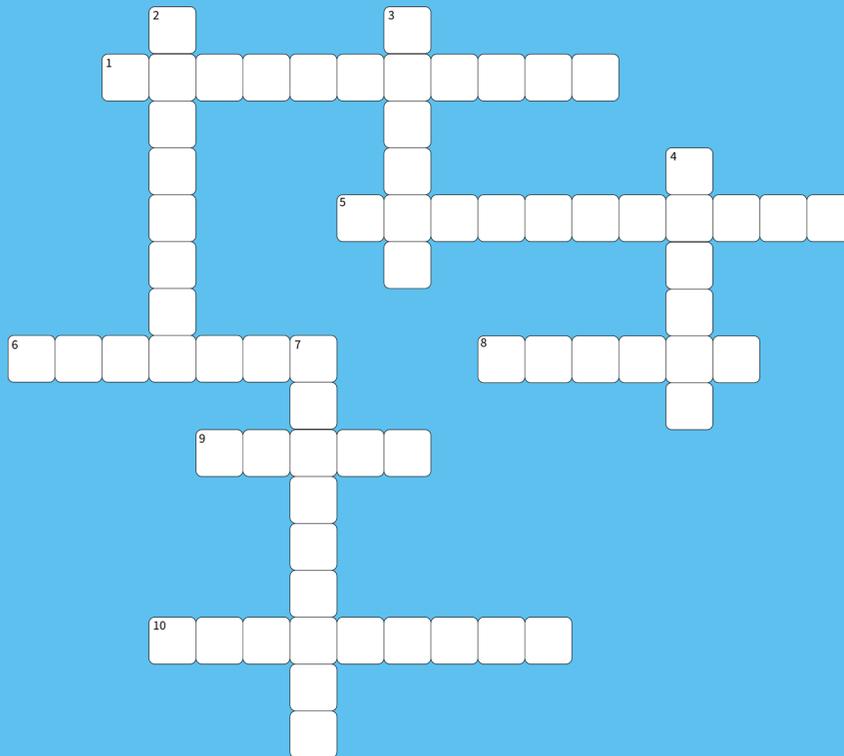
Special Mission Vehicle

Dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi pengelolaan fiskal utama/rutin

Trickle-down Effect

Menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata

Quiz FISKAL!



Mendatar

- 1 Memperteguh atau memperkuat
- 5 Ibukota Kalimantan Selatan
- 6 Surplus (Antonim)
- 8 Mendunia
- 9 Monumen Nasional
- 10 Penyebaran

Menurun

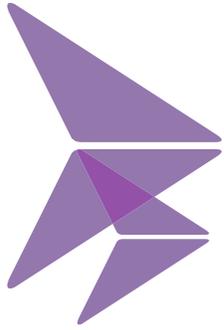
- 2 Badan usaha yang berasaskan kekeluargaan
- 3 Zat yang tidak larut dalam air
- 4 Makanan
- 7 Rumah adat Sulawesi Selatan

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Pemenang Kuis Edisi I/2022:

1. Marsel Palayukan
2. Sri Milawati Asshagab

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id